

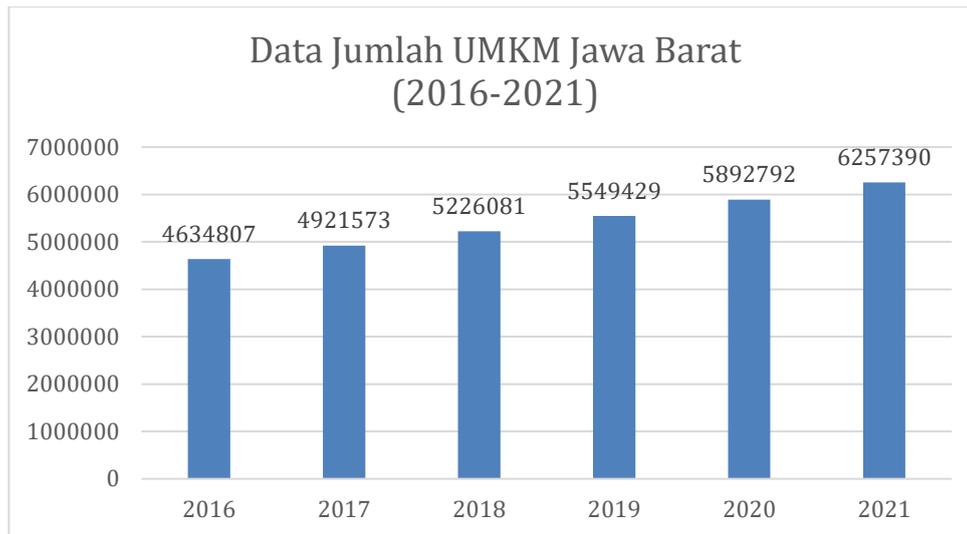
BAB I PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Sektor usaha yang dikenal dengan nama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mempunyai potensi untuk tumbuh dalam perekonomian. UMKM merupakan wadah untuk menghasilkan posisi-posisi yang bermanfaat. Usaha Kecil dan Menengah sangat penting dalam pembangunan dan pembangunan moneter, baik di negara-negara non-industri seperti Indonesia maupun di negara-negara maju. Menurut Priyadi et al (2018) ada beberapa hal proses dalam pengembangan suatu usaha dan memperbaikinya yaitu peningkatan jaringan pemasaran, distribusi yang baik, keterampilan teknis dan kerjasama yang tertuang di Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM.

Selain mendorong pertumbuhan dan perbaikan keuangan Indonesia, UMKM juga berperan penting dalam penanganan permasalahan pengangguran. Usaha kecil berkembang, memperluas bisnis, dan membuka peluang yang berharga. UMKM juga berperan penting dalam upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan dan pengangguran karena mampu menyerap banyak tenaga kerja. UMKM memiliki kekuatan yang lebih baik dalam menghadapi keadaan darurat, selain efisiensinya yang tidak setinggi organisasi besar. UMKM dapat beradaptasi dan bertahan terhadap perubahan pasar karena memiliki struktur organisasi dan tenaga kerja yang lebih sederhana dan fleksibel (Putri et al., 2022).

Saat ini pelaku usaha UMKM dituntut untuk bisa berkreasi dan berinovasi untuk bisa terus bertahan dan bersaing di pasaran. Perkembangan UMKM di Jawa Barat selama 6 tahun terakhir yaitu dari 2016 hingga 2021 mengalami kenaikan yang cukup signifikan yang artinya semakin banyak pelaku usaha yang melihat adanya peluang usaha di ranah UMKM untuk bisa berkembang dan bersaing di sektor yang mereka jalani.



Sumber: jabarprov (2021)

Gambar 1. 1 Grafik Peningkatan UMKM Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan grafik di atas, angka tepat jumlah UMKM di Jawa Barat pada tahun 2016 yaitu 4.634.807 dan pada tahun 2017 meningkat menjadi 4.921.573 yang artinya terdapat kenaikan sebesar 286.766 jumlah UMKM. Pada tahun 2017 hingga 2018 terjadi kenaikan kembali sebesar 304.508 pelaku usaha. Pada tahun 2018 hingga 2019 kembali naik sebesar 323.348 pelaku usaha. Tahun 2019 hingga 2020 naik sebesar 343.363 pelaku usaha. Sedangkan kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2020 hingga 2021 yaitu sebesar 364.598 pelaku usaha UMKM dan pada tahun 2021 total jumlah UMKM di Jawa Barat sebesar 6.257.390 pelaku usaha UMKM di berbagai bidang 2egative. Perlu adanya strategi dan inovasi untuk berkembang dan mempertahankan kinerja bisnis pada usaha tersebut.

Menurunnya daya beli masyarakat akibat pandemi virus Corona berdampak pada pendapatan usaha kecil, menengah, dan menengah (UMKM) di Wilayah Jawa Barat. Menurut Kusmana Hartadji selaku Pimpinan Kantor Koperasi dan Perusahaan Swasta (KUK) se-Jawa Barat, pendapatan UMKM menurun hingga angka 80% disaat Covid-19. Pada masa Covid-19 banyak dari para pelaku usaha yang mampu bertahan, namun tidak sedikit juga pelaku usaha yang berhenti dan gulung tikar. Menurut Gunawan *et al* (2022) pada masa Covid-19 banyak UMKM khususnya di negara berkembang terpaksa untuk mengurangi kapasitas jumlah produksi dan lapangan kerja. Selain itu, penurunan pendapatan membuat bahan baku menjadi naik dan langka. Para pelaku usaha UMKM sulit untuk mendapatkan kembali perputaran permodalan dan itu menghambat pada rantai produksi dan distribusi produk (Nursyabani, 2021).

Tidak jarang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menghadapi berbagai tantangan, baik internal maupun eksternal.

1. Permasalahan Internal

- a. Adanya batas modal.
- b. Kemampuan mengenai pengetahuan sumber daya manusia (SDM) masih tergolong rendah, pelaku UMKM belum bisa membedakan keuangan rumah tangga dan usaha, kurangnya pengetahuan mengenai penerapan teknologi dalam operasional usaha, kurangnya kemampuan membaca pasar, dan permasalahan terkait pemasaran dan penyusunan rencana strategis pengembangan usaha.
- c. Pelaku UMKM tetap eksis sebagai badan hukum tersendiri.
- d. Masalah tanggung jawab, dimana pelaku UMKM belum menjalankan organisasi moneter dan pengurus dengan baik.

2. Permasalahan Eksternal

- a. Kondisi dunia usaha yang belum kondusif karena koordinasi antar pemangku kepentingan belum terintegrasi dan cenderung independen.
- b. Pembatasan perkantoran dan yayasan, khususnya pemanfaatan inovasi.
- c. Permasalahan akses yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, dimana mereka belum mampu untuk tetap mewaspadaikan perubahan selera pembeli, khususnya yang berbasis perdagangan (LPPI dan Bank Indonesia, 2015).

Kabupaten Bandung merupakan Ibu kota Rezim Bandung ke daerah Pemerintahan Bandung yang mula-mula berada di Kabupaten Bandung sampai ke lingkungan Pemerintahan Bandung, khususnya wilayah Baleendah. Pada tanggal 20 April 1974, bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bandung ke-333, dilakukan peletakan batu bata pertama. Rencana pemindahan ibu kota terus berlanjut hingga Kolonel R. Sani Lupias Abdurachman mengambil alih jabatan bupati (1980–1985). Wilayah Baleendah tidak dapat dijadikan ibu kota kabupaten karena letaknya yang fisik. Akibatnya ibu kota Kabupaten Bandung berpindah ke Kecamatan Soreang pada masa Kolonel H.D. Cherman Affendi menjabat sebagai bupati pada tahun 1985 hingga 1990. Pusat pemerintahan Kabupaten Bandung seluas 24 ha ini dibangun di pinggir jalan raya Soreang, tepatnya di desa Pamekaran. Menampilkan arsitektur khas Priangan dan dikatakan sebagai kompleks perkantoran termegah di Jawa Barat. (Sumarna, 2010).

Sesuai dengan asas otonomi, desentralisasi, desentralisasi, dan pengelolaan bersama, wilayah daratan dan perairan Indonesia dibagi antar pemerintah daerah dalam batas wilayahnya masing-masing. yang saat ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Provinsi yang telah beberapa kali direvisi dikelola oleh Dinas Usaha Dalam Negeri. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bagian VI Pasal 18 Ayat 1 menyatakan hal itu “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Sebagaimana ditunjukkan dalam artikel tersebut, daerah dan komunitas perkotaan memiliki tingkat yang setara dan memiliki badan pemerintahan dan administratif yang berdekatan. Kabupaten lebih luas dari kota dalam hal luasnya, dan setiap kabupaten atau kota terdiri dari beberapa distrik. Daerah dipimpin oleh seorang pejabat di DPRD kota, sedangkan daerah dipimpin oleh seorang ketua DPRD kota. Pemilihan umum digunakan untuk memilih walikota dan bupati.

Visi Pemerintahan Bandung adalah terwujudnya kelompok Masyarakat Bandung yang Membangkitkan, Edukatif, Dinamis, Tegas dan Sejahtera atau disingkat BEDAS.

Misi Kabupaten Bandung berorientasi pada pembangunan, dengan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan melindungi hak-hak setiap orang..



Gambar 1. 2 Logo Kabupaten Bandung

Sumber: bandungkab (2020)

Dengan banyaknya UMKM yang ada saat ini di daerah Kabupaten Bandung, ini akan menjadi hal positif dan juga 4egative. Dari begitu banyak UMKM di Kabupaten Bandung, tentu juga pesaing yang ada sehingga para pelaku usaha harus memiliki strategi dan inovasi yang bisa bersaing dan mempertahankan usahanya. Orientasi kewirausahaan disini merupakan sebuah proses dalam melakukan suatu inovasi, proaktif dan berani untuk mengambil resiko dalam menjalankan usaha. Orientasi kewirausahaan akan memacu para pelaku usaha untuk bisa terus bersaing di industrinya. Selain itu, pelaku usaha UMKM harus bisa memahami orientasi pasar pada industrinya masing – masing. Perusahaan yang merupakan pelaku usaha UMKM yang berorientasi pasar mampu mengetahui lebih jauh

apa yang dibutuhkan pelanggan, sehingga mampu menciptakan nilai bagi pelanggan dan mengembangkan strategi pasar berdasarkan kelebihan dan kelemahan pesaing..

Perkembangan UMKM saat ini semakin berkembang seiring berjalannya waktu banyak pelaku usaha UMKM khususnya di Kabupaten Bandung melakukan kegiatan usaha yang bergerak di berbagai sektor. Dilihat dari data yang ada saat ini, UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dari total keseluruhan 17.755 UMKM yang bergerak dari berbagai bidang seperti sektor aksesoris, batik, kerajinan, kuliner, jasa dan lainnya. Dibawah ini merupakan data UMKM tersebar di 31 Kecamatan.

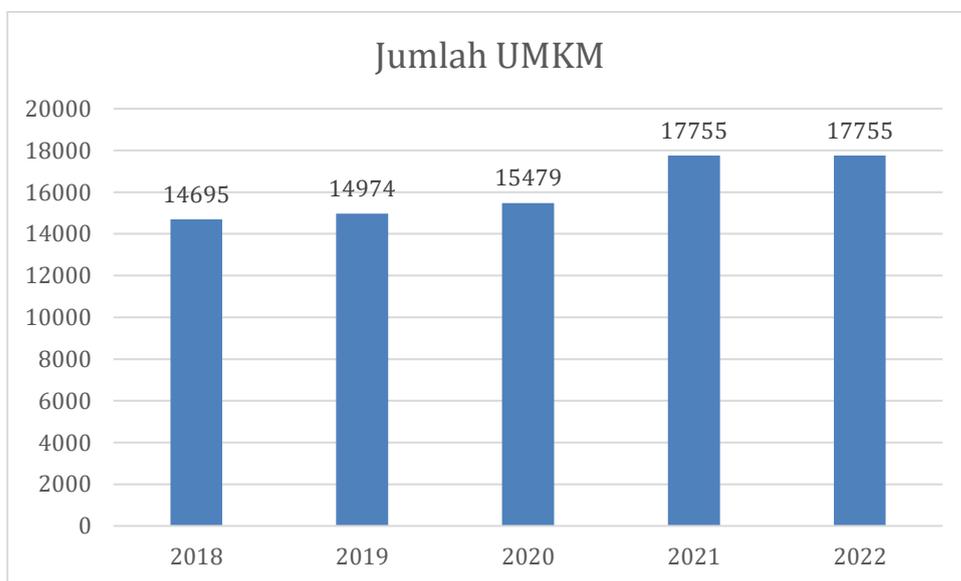
Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Berdasarkan Jenis Usaha di Kabupaten Bandung Tahun 2022

Kabupaten/Kota	Kategori Usaha	Jumlah UMKM
Kabupaten Bandung	Agrobisnis	4214
	Fashion	2142
	Kerajinan	447
	Kuliner	9457
	Lainnya	1495
Total		17755

Sumber: diskopbandungkab (2022)

Pada Tabel 1.3 di paparkan bahwa 2022 UMKM yang bergerak pada sektor kuliner khususnya Kabupaten Bandung total 9.457 pelaku usaha UMKM yang bergerak di sektor kuliner. Sektor kuliner menjadi paling besar jumlahnya di antara sektor lainnya, sedangkan sektor industri kerajinan menjadi yang terendah di Kabupaten Bandung dengan angka 447 pelaku usaha UMKM. Hal itu menandakan bahwa pelaku usaha yang bergerak di sektor kuliner menjadi yang terbanyak di antara sektor lain. Permasalahan dari banyaknya pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bandung menandakan bahwa mereka harus bisa bisa terus berinovasi dan memiliki strategi dalam menjalankan bisnis tersebut untuk bisa bersaing dengan para kompetitor di sektor tersebut.

Selain itu, data menurut dua sumber yang ada yaitu *ppid.bandungkab* dan *diskop.bandungkab* dalam beberapa tahun terakhir yaitu dari tahun 2018 hingga 2022, peningkatan jumlah pelaku UMKM di Kabupaten Bandung tidak terjadi kenaikan jumlah UMKM pada tahun 2021 hingga 2022. Jumlah UMKM Kabupaten Bandung pada 2022 menyentuh angka 17.755 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa minat para pelaku usaha UMKM sudah cukup tinggi namun terjadi angka yang stagnan berdasarkan data yang ada. Jika dilihat dari naiknya tiap tahun dalam segi angka, belum pasti menentukan bahwa tingkat kualitas UMKM di Kabupaten Bandung itu baik. Dengan naiknya tiap tahun itu menjadi hal yang baik dan positif atau hanya sekedar kenaikan angka tanpa melihat kualitas dan kinerja bisnis dari pelaku usaha UMKM di Kabupaten Bandung. Tentunya pelaku usaha yang memiliki strategi dan inovasi pasti akan terus bertahan dan memiliki jangka waktu usaha yang paling lama waktunya sehingga hal itu menjadi hal yang penting bagi UMKM di Kabupaten Bandung. Angka kenaikan tiap ini masih menjadi hal yang belum pasti apakah di setiap tahun itu terdapat UMKM yang gulung tikar dan digantikan dengan pelaku usaha yang baru atau memang pelaku usaha yang sudah lama tetap bertahan dan melanjutkan usahanya dengan baik. Dibawah ini merupakan grafik kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Bandung dalam kurun waktu 2018 hingga 2022 berdasarkan data dua sumber yang digabungkan menjadi satu.



Gambar 1. 3 Grafik Peningkatan UMKM Kabupaten Bandung Tahun (2018-2022)

Sumber: Data diolah penulis (2023)

Berdasarkan Gambar 1.3 pada tahun 2018 hingga 2019 terjadi kenaikan sebesar 279 pelaku usaha UMKM. Pada tahun 2019 hingga 2020 terjadi kenaikan sebesar 505 UMKM dan pada

tahun 2020 hingga 2021 terjadi kenaikan jumlah UMKM tertinggi yaitu sebesar 2276 UMKM. Sedangkan pada tahun 2021 hingga 2022 tidak adanya kenaikan jumlah UMKM yang terdaftar pada Dinas Koperasi Kabupaten Bandung. Artinya pada rentan waktu tersebut terjadi naik turun kenaikan UMKM tiap tahunnya. Hal ini menjadi permasalahan yang ada karena kenaikan jumlah UMKM di Kabupaten Bandung terjadi *fluktuatif*.

Dalam berjalannya bisnis tentu harus memiliki tujuan dan strategi dalam menjalankannya. Selain itu, perlu adanya kinerja yang baik dalam menjalankan bisnis tersebut. Manajemen dan organisasi dalam bisnis tersebut memiliki peran penting dalam membangun dan berkembangnya bisnis tersebut dari segala aspek seperti penjualan, inovasi, dan strategi untuk bisnis tersebut.

Menurut Ini Ekonomi melalui Kantor Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Pemerintahan Bandung, ia mengakui saat ini wilayahnya memiliki jumlah UMKM terbesar di Bandung Utama. Namun dalam pengembangan UMKM masih menjadi kendala karena terdorong oleh beberapa hal. Mulai dari kualitas sumber daya manusia, beralih ke permodalan, hingga akhirnya mendapatkan akses pemasaran produk dari UMKM di Kabupaten Bandung. Menurut Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, dari banyaknya pelaku UMKM di Kabupaten Bandung, dinilai masih banyak kelemahan yang ada pada UMKM. Perlu adanya strategi dan inovasi yang dapat mengembangkan UMKM di Kabupaten Bandung (Nashear, 2022).

Saat ini di era globalisasi tentu perkembangan akan semakin maju mulai dari segi strategi, inovasi dan yang lainnya. Kemampuan dalam melihat peluang terhadap pasar sangat diperlukan untuk dapat bersaing dengan Usaha Micro Kecil Menengah lainnya. Persaingan saat ini sudah menjadi wajar terkhusus di sektor kuliner, sudah banyak para penggiat usaha yang bergerak dan saat ini inovasi dalam usaha tersebut sangat dibutuhkan. Namun, kenyataan saat ini lingkungan bisnis menuntut para pelaku usaha untuk bisa mengikuti perkembangan yang sedang *trend* di masyarakat. Orientasi pasar akan menimbulkan peluang dan inovasi karena dengan adanya orientasi pasar tersebut akan menimbulkan persaingan dan otomatis akan berimbang pada kinerja pada bisnis tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan Abdualmajed *et al* (2020) menyatakan bahwa keterkaitan hubungan antara orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan manajemen kualitas total secara menyeluruh berdampak signifikan positif terhadap kinerja bisnis. Sedangkan menurut Mukson, Ikhwan S & Riono S (2021) terlepas dari kenyataan bahwa pengembangan

secara langsung berdampak pada pelaksanaan organisasi melalui sistem bisnis, arah inovatif tidak mempengaruhi pelaksanaan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan Kania dan Levyda (2021) menyatakan bahwa pada indeks minat bersaing dan indeks risiko, indikator orientasi kewirausahaan memiliki nilai rata-rata tertinggi dan terendah. Pelaku usaha UMKM berani mengambil peluang yang seharusnya dimiliki oleh semua usaha UMKM. Semakin kuat orientasi kewirausahaan peserta UMKM, semakin baik juga hasil perusahaan tersebut. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan oleh Andri (2019) menyatakan bahwa pemilik Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada Pelaku usaha kuliner harus mengikuti pelaksanaan arahan pasar yang baik sambil terus melakukan latihan yang kejam dalam menciptakan loyalitas konsumen untuk lebih mengembangkan pelaksanaan bisnis.

Menurut Fitri R (2022) menunjukkan bahwa arah perintisan secara nyata mempengaruhi arah pasar, arah pasar secara tegas mempengaruhi pengembangan produk, pengembangan produk secara nyata mempengaruhi pelaksanaan organisasi, arah giat secara implikasi mempengaruhi pengembangan produk melalui arah pasar.

1.2 Perumusan Masalah

Jumlah UMKM di Kabupaten Bandung menjadi kedua terbanyak di antara Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah sebanyak 17.606 UMKM yang tersebar di 31 kecamatan Kabupaten Bandung. Perkembangan zaman yang terus maju membuat jumlah UMKM di Kabupaten Bandung semakin meningkat, dalam kurun waktu lima tahun jumlah UMKM meningkat terus namun terjadi penurunan pada tahun 2022. Banyak pelaku usaha UMKM yang mencoba menciptakan peluang di daerah Kabupaten Bandung.

Namun, dilihat dari penurunan angka pada tahun 2022 maka para pelaku usaha harus terus menciptakan strategi dan inovasi dalam menjalankan usaha tersebut agar dapat mempertahankan usahanya. Pada tahun 2019 hingga 2022 terjadi adanya wabah Covid-19, hal itu tidak menurunkan minat masyarakat dalam berwirausaha di Kabupaten Bandung. Meskipun, banyak pelaku usaha khususnya yang terkena dampak dari wabah Covid-19. Perubahan strategi dan inovasi dalam menjalankan usaha tersebut dibutuhkannya pemahaman tentang pentingnya strategi dan inovasi. Dari hasil beberapa penelitian yang dilakukan di beberapa Kabupaten dan Kota di Indonesia, orientasi kewirausahaan, orientasi pasar dan manajemen kualitas total berdampak positif dan negatif terhadap kinerja bisnis UMKM.

Dari penjelasan dan pemaparan yang sudah di jelaskan, tentu diperlukannya validasi dan pembuktian untuk mencari sebesar besar nilai pengaruh dari entrepreneurial orientation, market orientation dan total quality management terhadap kinerja bisnis UMKM dan menjadi faktor peningkatan UMKM tiap tahunnya di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan permasalahan diatas, untuk memudahkan penelitian berikut merupakan pertanyaan penelitian dari rumusan masalah yang telah disajikan:

1. Seberapa besar nilai *Entrepreneurial Orientation* berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Kabupaten Bandung?
2. Seberapa besar nilai *Market Orientation* berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Kabupaten Bandung?
3. Seberapa besar nilai *Total Quality Management* berpengaruh terhadap kinerja bisnis UMKM di Kabupaten Bandung?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah penelitian mengenai Pengaruh Orientasi Kewirausahaan dan Pasar, Manajemen Kualitas Total Terhadap Kinerja Bisnis UMKM Sektor Kuliner di Kabupaten Bandung, tujuan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Entrepreneurial Orientation* terhadap kinerja bisnis UMKM di Kabupaten Bandung.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Market Orientation* terhadap kinerja bisnis UMKM di Kabupaten Bandung.
3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Total Quality Management* terhadap kinerja bisnis UMKM di Kabupaten Bandung.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Aspek Praktis

Penelitian ini berharap dapat menjadi bahan bacaan untuk para pelaku usaha khususnya UMKM di Kabupaten Bandung untuk dapat meningkatkan kesadaran terkait pentingnya pengaruh *Entrepreneurial Orientation*, *Market Orientation* dan *Total Quality Management* terhadap kinerja bisnis.

1.4.2 Aspek Teoritis

Penelitian ini berharap dapat menjadi bahan bacaan untuk penambahan pengetahuan dan wawasan bagi semua pihak yang membaca penelitian ini.

1.5 Sistem Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan dari penelitian ini menyampaikan gambaran umum terkait penelitian yang dilakukan. Berikut adalah sistematika penulisan dari penelitian yang dibuat oleh penulis:

BAB I PENDAHULUAN

Bagian yang memahami objek pemeriksaan sejenak dengan item di balik layar, objek penelitian, definisi masalah, tujuan dan keuntungan penelitian, dan komposisi tugas terakhir yang efisien.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bagian memahami hipotesis yang dihubungkan dengan pemeriksaan dengan eksplorasi masa lalu, kemudian menggambarkan struktur pemeriksaan, dan memahami spekulasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab yang memaparkan metode pendekatan yang berisikan Jenis Penelitian, Operasionalisasi Variabel, Populasi dan Sampel, Pengumpulan Data, Uji Validitas dan Reliabilitas, dan Teknik Analisis Data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang berisi mengenai hasil penelitian serta pembahasan. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian dapat dibahas secara jelas dengan pemecahan terhadap masalah menggunakan metode yang sudah ditentukan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab yang berisikan kesimpulan berdasarkan hasil penelitian serta saran yang bertujuan memberikan manfaat penelitian kepada objek penelitian maupun pihak lain yang terkait dalam penelitian.